

**KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MENURUT FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Oleh :**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS D-2009 038 sj	NO. REG : S-2007/Sj/038
	ASAL BOKU :
	TANGGAL :

**ABDULLAH TIRTA HADI W  
NIM: C03302047**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA  
2009**



**KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MENURUT FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Oleh:*

**ABDULLAH TIRTA HADI W**

**NIM: C03302047**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA**

**2009**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN:**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Tirta Hadi W  
NIM : CO3302047  
Semester : 14  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Tandes Lor RT 01 RW 01 No 18 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juli 2009



**Abdullah Tirta Hadi W**  
**CO3302047**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **ABDULLAH TIRTA HADI W**

NIM : **C03302047**

Judul : **KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, *27 Juli*, 2009

Pembimbing,



**H. Mohammad Arif, MA**  
**NIP. 150321632**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Tirta Hadi W ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

**H. Mohammad Arif, MA.**  
NIP. 197001182002121001

Sekretaris,

**Hj. Nurlailah, SE., MM.**  
NIP. 196205222000032001

Penguji I,

**Drs. Marjudi, SH.**  
NIP. 194810061978031003

Penguji II,

**Muwahid, SH., MH.**  
NIP. 197803102005011004

Dosen Pembimbing,

**H. Mohammad Arif, MA**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, Agustus 2009  
Mengetahui/ Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Ampel Surabaya



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002













Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28, maka sesuatu yang amat penting adalah diberikannya perlindungan hukum serta perlindungan hak-hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia dari tindakan pemerintah. Sarana untuk mencapai keinginan tersebut sudah lama tertanam di hati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat Indonesia maupun di hati pemerintah Indonesia, namun kenyataannya baru dapat diwujudkan pada akhir tahun 1986 dalam wujud Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yaitu tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sempat diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.















bukunya “*Fiqh Siyasa*h Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “, yang menyatakan bahwa dalam beberapa hal, *Wilāyah al-Mazālīm* ini dapat disejajarkan dengan PTUN dalam system peradilan Indonesia. Akan tetapi ungkapan ini tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Selibhnya tidak penulis temukan karya-karya tulis yang lain, yang membahas permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian ini dan menyajikan dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat bagi beberapa pihak yang mungkin memerlukannya, baik sebagai bahan kajian atau sekedar wawasan keilmuan. Karena pembahasan tentang lembaga-lembaga negara seperti PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai penyelenggara Peradilan dalam lingkup administrasi negara. Dalam pandangan *Fiqh Siyasa*h belum banyak tersentuh sama sekali karena proses dalam PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sangat terbatas dalam ruang lingkup melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah, mulai sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu para pemikir-pemikir dalam era ini masih terjebak atau hanya konsentrasi pada pembahasan mengenai relasi agama dan negara sekaligus bentuk atau sistem negara seperti apa yang harus diterapkan oleh umat Islam.









Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai tugas dan kewenangan hakim PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut *Fiqh Siyasah*. Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan disertai dengan sub-bab dan beberapa lampiran secara sistematis pembahasan ini yaitu:

- Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II : Sejarah dan Kewenangan Hakim peradilan dalam Islam berisi tentang sejarah peradilan dalam Islam, kewenangan hakim dalam Islam dan macam lembaga kekuasaan kehakiman dalam Islam.
- Bab III : Bagaimana kewenangan hakim Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,















dalam kata-katanya agar ia (Nabi SAW) memutuskan di antara kamu; dan juga dilihat dari kata-kata Nabi SAW ketika perkara itu dinaikkan banding kepadanya: "itulah apa yang telah diputuskan di antara kamu; ini semua memberi arti tentang adanya pengukuhan keputusan hukum dari qadli" pada (pengadilan) tingkat pertama (oleh pengadilan yang lebih tinggi).

## **2. Peradilan di Masa Khulafa' Rasyidin**

Sepeninggal Rasulullah SAW pucuk pimpinan pemerintahan Islam digantikan oleh Abu Bakar, di tangan Abu Bakar ini kondisi peradilan Islam tidak banyak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasul SAW, peperangan melawan Nabi palsu Musailah Al Kadzab, menundukkan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat, serta urusan politik dan pemerintahan yang lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.

Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, Abu Bakar selalu melihat isi Al Qur'an, jika ia menemukan hukum Allah di dalam Al Qur'an atas persoalan yang dihadapi maka ia memutuskan perkara dengannya. Akan tetapi jika tidak ditemukan maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunah-sunah Rasul. Jika ia belum menemukan keputusan berdasarkan Al Qur'an dan sunah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk diminta keterangan terhadap perkara yang









Ustman adalah khalifah yang mula-mula membangun gedung pengadilan, yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai tempat pengadilan. Demikian juga, di masa khalifah-khalifah ini telah ditertibkan gaji bagi pejabat-pejabat peradilan dengan diambilkan dari kas baitul maal yang mula-mula dirintis di masa khalifah Abu Bakar ra. Demikian pula khalifah Ali Bin Abi Thalib mengangkat Abu Nakhai sebagai gubernur di Ustur dan Mesir dengan peran-perannya, agar ia bertaqwa kepada Allah dan agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan.

Di dalam masa Khulafa' Rasyidin, belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan, hal ini disebabkan karena qhodi'lah yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya. Pada masa itu, hakim di samping bertindak sebagai pemutus perkara, juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Kebanyakan hakim pada masa itu duduk di rumahnya sendiri menerima dan memutuskan perkara, karena pada masa itu qhodi' belum memiliki tempat khusus (gedung pengadilan). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, masjidlah yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan segala sengketa, karena masjid-masjid pada masa itu tidak hanya khusus untuk tempat bersembahyang, yang memang demikian sebenarnya fungsi masjid. Ia



ijma' dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menentukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli-ahli fiqh yang berada di kota itu. Dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat.

- b. Lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu qoḍi'-qoḍi' pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan.

Pada masa ini, lahir pemikiran tentang adanya pencatatan keputusan hukum. Adapun yang mula-mula mencatatnya adalah qoḍi' Mesir di masa ke khalifahan Muawiyah yang bernama Salim Bin Atas. Pernah suatu kali terjadi sengketa harta pusaka (warisan) yang telah diputus, kemudian di lain waktu pihak-pihak yang berperkara itu mengingkari keputusan itu, kemudian mereka mengulangi mengajukan perkara tersebut. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan tersebut dicatat serta



- b. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qoḍi', sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqoha' dari jabatan ini (hakim).
- c. Lahirnya istilah atau kedudukan *Qoḍi' Al Quḍot*, lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang. Qoḍi' quḍot ini berkedudukan di ibukota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qoḍi' quḍot yang pertama ialah Al Qoḍi' Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, penyusun kitab Al Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun Al Rasyid, yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim.

Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri, dengan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan Qoḍi' quḍot yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula Qoḍi' quḍot.

Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan waqaf dan menunjukkan



- b. Peradilan *campuran*, yang didirikan pada tahun 1875 dan sumber hukumnya adalah undang-undang asing.
- c. Peradilan *Ahli* (adat), didirikan pada tahun 1883, dan sumber hukumnya adalah undang-undang Prancis.
- d. Peradilan *Milly* (peradilan agama-agama di luar Islam), sumber hukumnya adalah agama-agama golongan di luar Islam.
- e. Peradilan *Qunshuliy* (peradilan negara-negara asing), di mana pengadilan-pengadilan dari peradilan *Qunshuliy* ini mengadili berdasarkan undang-undang negara masing-masing.

Begitulah keadaannya di Mesir, sedikit demi sedikit terus menerus berkembang aturan-aturannya sehingga aturan-aturan pengadilan di Mesir itu mengambil peraturan pengadilan dari negeri yang tidak Islami. Dan sedikit demi sedikit hakim-hakim pengadilan Mesir itu menjauhkan diri dari hukum-hukum Islam dan mengambil hukum barat.

Inilah selintas sejarah peradilan dan perkembangannya di masa-masa Islam, dan tidak diragukan lagi di masa-masa permulaannya bahwa putusan-putusan hakim benar-benar agamis, karena sumber hukumnya diambilkan dari agama sehingga memiliki kekuatan dan wibawa, tidak ada yang ditakuti oleh hakim-hakim kecuali kemurkaan Allah dan siksaNya. Mereka tidak takut pada penguasa pemerintahan yang berwenang melaksanakan putusan-putusan itu, maka oleh karena itu, penguasa-penguasa pemerintahan pada





b. Berakal (mempunyai kecerdasan), untuk syarat yang kedua ini telah menjadi kesepakatan para ulama', akan tetapi tidak cukup hanya dipandang telah mukallaf (terkena beban agama), berakal di sini adalah orang yang cerdas dan bijaksana yang dengan ketajaman otaknya ia dapat memecahkan masalah yang pelik dengan penjelasan, dan menanggapi sesuatu yang musykil.

Islam, berdasarkan jumbuh ulama' keislaman itu adalah syarat bolehnya seseorang untuk menjadi saksi atas seseorang muslim. Oleh karenanya hakim yang tidak muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim

c. Adil, artinya tidak memihak pada salah satu, benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur dalam keadaan marah atau suka. maka tidak diperkenankan mengangkat qoḍi' yang *fasiq*.

d. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya, dapat membedakan yang hak dari yang bathil, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai aturan.

e. Sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan, dengan kesempurnaan indera yang dimiliki, seorang hakim diharapkan mendapat informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi sebagian pengikut























































- (1) Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.
  - (2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu KTUN itu dianggapnya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Kelompok ketiga adalah badan Atau jabatan TUN yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan TUN untuk menggugat.

Sedangkan yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak *tergugat* dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UU PTUN dan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN,” Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dan dalam penjelasannya disebutkan “Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta













*attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan :
  - a. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
  - b. Secara vertical, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri antara lain di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.

Ketiga, adalah pembagian atas *Kompetensi absolut* dan *Kompetensi relatif*. *Kompetensi absolut* adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan



















dapat disejajarkan dengan lembaga *Al-Mazālim* di dalam Islam. Ini tidak terlepas dari keberadaan lembaga *Al-Mazālim* itu sendiri yang berwenang memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Lebih jelas bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam, tapi berikut beberapa perkara yang ditangani lembaga *Al-Mazālim* yang ada kemiripannya dengan wilayah Peradilan Tata Usaha Negara antara lain;

1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim.
5. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *hisbah*.

Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh pejabat Keputusan Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan, yang kemudian dapat berakibat pada tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, yang tidak jarang keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ini didasari karena ada permainan uang atau maksud-maksud negative dari pejabat yang kemudian berdampak merugikan masyarakat. Hal

ini dapat diselaraskan dengan arti kesewenang-wenangan oleh penguasa yang dimaksud di dalam *Al Mazālim*.

Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu antara lain, seperti pendataan penduduk oleh Dinas kependudukan, penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan, dan masalah-masalah Tata Usaha yang lain seperti, perizinan, keuangan Negara, pajak, kesehatan rakyat, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain.

Apabila dilihat dari obyek Tata Usaha Negara itu sendiri, lembaga kehakiman Islam yang salah satu tugasnya mengatur masalah-masalah administrasi Negara di antaranya, memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak, tidak melukai hak-hak para tetangga, menekankan para pemilik hewan untuk memberikan makan, mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak, dan lain-lain, yaitu lembaga *ḥisbah* Dasar hukum kehadiran lembaga *ḥisbah* ini adalah sunnah, termasuk kategori *sunnah fi'liyah* atau perbuatan Nabi Saw sendiri yang menemukan tindak kecurangan di pasar.

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia ini dapat disejajarkan dengan lembaga *Al-Mazālim* di dalam Islam. Ini tidak terlepas dari keberadaan lembaga *Al-Mazālim* itu sendiri yang berwenang memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Lebih jelas bahwa perkara-perkara yang diperiksa

oleh lembaga ini ada 10 macam, tapi berikut beberapa perkara yang ditangani lembaga *Al-Mazālim* yang ada kemiripannya dengan wilayah Peradilan Tata Usaha Negara antara lain;

1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang zalim.
5. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *ḥisbah*.



yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan tentang kemerdekaan Hakim lembaga peradilan dalam memutuskan perkara seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim itu memiliki hak otonom yang sempurna Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri.





